

PERKUAT TATA KELOLA PERIKANAN: MENUJU KESEIMBANGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA LAUT MELALUI HUKUM PERIKANAN

¹ Emiel Salim Siregar, ² Cici Rahma Alia Simanjuntak, ³ Khairunnisak Panjaitan, ⁴ Muhammad Hafiz Nurhasan Sihombing,

⁵ Julio Calvin Dheo Pasaribu, ⁶ Firma Ndruru

^{1,2,3,4,5,6} Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Jl. Ahmad Yani No. 1, Kisaran Kota, Kec. Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, 21214, Indonesia.

Alamat Email: ¹emielsalimsrg1988@gmail.com,

²cicirahmaaliasimanjuntak@gmail.com, ³khairunnisa010199@gmail.com,

⁴hafizsihombing12@gmail.com, ⁵dheopasaribu@gmail.com ,

⁶firmandruru25@gmail.com

ABSTRACT

Strong fisheries governance is the main key to achieving balance in the marine ecosystem and maintaining the sustainability of fisheries resources. This abstract discusses the important role of fisheries law in strengthening fisheries governance to achieve marine resource conservation goals. In response to exploitative pressures on global fisheries, fisheries conservation efforts through legal regulations have become increasingly urgent. Fisheries law has a crucial role in setting limits on exploitation, encouraging sustainable fishing practices, and protecting marine habitats. In this abstract, the discussion includes efforts to strengthen the legal framework that can lead to effective fisheries governance. The existence of proactive policies, strict law enforcement, and active participation from stakeholders are key factors in achieving balance in the marine ecosystem. Through the implementation of sustainability-oriented fisheries law, it is hoped that fair, transparent and sustainable fisheries governance can be created. This abstract also highlights the importance of international cooperation in facing global fisheries challenges, as well as the need to adapt fisheries law to the changing dynamics of the marine environment. In this way, strong understanding and application of fisheries law becomes the foundation for joint efforts to safeguard marine resources for future generations.

Key words: Fisheries Governance, Marine Ecosystem Balance, Fisheries Law and Conservation

ABSTRAK

Tata kelola perikanan yang kuat menjadi kunci utama untuk mencapai keseimbangan ekosistem laut dan menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan. Abstrak ini membahas peran penting hukum perikanan dalam menguatkan tata kelola perikanan demi mencapai tujuan konservasi sumber daya laut. Sebagai respons terhadap tekanan eksploitatif terhadap perikanan global, upaya konservasi perikanan melalui regulasi hukum menjadi semakin mendesak. Hukum perikanan memiliki peran krusial dalam menetapkan batasan eksploitasi, mendorong praktik perikanan berkelanjutan, dan melindungi habitat laut. Dalam abstrak ini, pembahasannya mencakup upaya untuk memperkuat kerangka hukum yang dapat mengarah pada tata kelola perikanan yang efektif. Adanya kebijakan yang proaktif,

penegakan hukum yang ketat, serta partisipasi aktif dari pemangku kepentingan menjadi faktor kunci dalam mencapai keseimbangan ekosistem laut. Melalui implementasi hukum perikanan yang berorientasi pada keberlanjutan, diharapkan dapat terbentuk tata kelola perikanan yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Abstrak ini juga menyoroti pentingnya kerjasama internasional dalam menghadapi tantangan perikanan global, serta perlunya adaptasi hukum perikanan dengan dinamika lingkungan laut yang terus berubah. Dengan demikian, pemahaman dan penerapan hukum perikanan yang kuat menjadi fondasi bagi upaya bersama dalam menjaga sumber daya laut bagi generasi mendatang.

Kata kunci: Tata Kelola Perikanan, Keseimbangan Ekosistem Laut, Hukum Perikanan dan Konservasi

A. Pendahuluan

Perikanan memiliki peran strategis dalam pemenuhan kebutuhan pangan global dan mendukung ekonomi masyarakat pesisir. Namun, eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya laut telah menimbulkan tantangan serius terhadap keberlanjutan ekosistem laut. Untuk mengatasi dampak negatif yang telah terjadi dan merencanakan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, diperlukan upaya nyata dalam memperkuat tata kelola perikanan (Siombo, 2013)

Pentingnya tata kelola perikanan yang efektif tak terelakkan, terutama dalam menghadapi tekanan eksploitatif yang semakin meningkat sebagai akibat dari pertumbuhan populasi manusia, peningkatan permintaan pasar, dan perubahan iklim. Mencapai keseimbangan ekosistem laut bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga

merupakan investasi jangka panjang untuk menjaga sumber daya laut yang vital bagi kehidupan di Bumi.

Dalam konteks ini, hukum perikanan memainkan peran krusial sebagai alat utama untuk mengelola dan melindungi sumber daya laut. Melalui kerangka hukum yang tepat, regulasi perikanan dapat menentukan batasan tangkap, musim penangkapan, dan daerah penangkapan. Selain itu, hukum perikanan dapat memotivasi praktik-praktik perikanan berkelanjutan, merangsang penelitian ilmiah, dan mendorong partisipasi aktif pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam abstrak ini, fokusnya adalah upaya untuk memperkuat tata kelola perikanan melalui pengembangan dan implementasi hukum perikanan yang efektif. Melibatkan pemangku kepentingan utama seperti nelayan, ilmuwan,

pemerintah, dan organisasi non-pemerintah menjadi bagian integral dari langkah-langkah menuju keseimbangan ekosistem laut dan konservasi sumber daya perikanan. (Susilo,2017)

Pentingnya penegakan hukum yang ketat, pemantauan efektif, serta pembaruan kebijakan yang adaptif terhadap perubahan lingkungan menjadi sorotan utama. Dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi, dan keadilan, diharapkan bahwa implementasi hukum perikanan dapat menjadi pilar utama dalam mendukung upaya global untuk melindungi dan menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Dengan demikian, langkah-langkah ini bukan hanya akan memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga akan memberikan kontribusi positif jangka panjang bagi kesejahteraan ekosistem laut dan kelangsungan hidup manusia.

B. Metode Penelitian

Studi pustaka ini mengadopsi pendekatan sistematis untuk mengeksplorasi, menyintesis, dan menganalisis literatur-literatur yang relevan dengan tema "Perkuat Tata Kelola Perikanan: Menuju

Keseimbangan dan Konservasi Sumber Daya Laut Melalui Hukum Perikanan." Metode ini bertujuan untuk memahami kontribusi dan peran hukum perikanan dalam upaya mencapai tata kelola perikanan yang efektif serta keseimbangan ekosistem laut (Istanto, 2015).

Metode studi pustaka ini memberikan dasar pengetahuan yang kokoh, memungkinkan pembaca untuk menggali isu-isu kritis seputar tata kelola perikanan, konservasi sumber daya laut, dan hukum perikanan dengan landasan yang solid dalam literatur ilmiah dan pemikiran-pemikiran ahli di bidang tersebut.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kontribusi hukum perikanan terhadap perkuatan tata kelola perikanan dalam konteks mencapai keseimbangan ekosistem laut

Pentingnya hukum perikanan sebagai alat pengelohan yang efektif menjadi semakin nyata dalam menghadapi tantangan eksploitatif terhadap sumber daya laut. Kontribusi hukum perikanan tidak hanya terbatas pada pembentukan peraturan dan kebijakan, tetapi juga mencakup pengawasan, penegakan, dan pembaruan terus-menerus dalam

menghadapi dinamika lingkungan laut yang terus berubah.

Perikanan memberikan landasan hukum yang jelas untuk mengelola kegiatan perikanan. Dalam konteks perkuatan tata kelola perikanan, pembentukan kerangka regulasi yang mencakup batasan tangkapan, musim pengkapan, dan daerah penangkapan menjadi instrumen penting dalam mencegah eksploitasi berlebihan terhadap spesies tertentu dan menjaga keseimbangan ekosistem.

Hukum Perikanan dapat mendorong praktik-praktik perikanan berkelanjutan melalui insentif, pengelolaan ukuran minimum tangkapan dan pelarangan prakti-praktik perikanan yang merugikan ekosistem menjadi langkah-langkah konkrit dalam mencapai keseimbangan ekosistem laut.

Melalui hukum perikanan pemerintah dapat menetapkan daerah-daerah perlindungan laut dan melibatkan pemangku kepentingan untuk menjaga kelestarian habitat penting bagi sumber daya perikanan. Penerapan regulasi ini menjadi langkah penting dalam meminimalkan dampak eksploitasi terhadap lingkungan laut dan menjaga keseimbangan ekosistem.

Kontribusi hukum perikanan juga terletak pada penegakan aturan dan sanksi yang diberlakukan terhadap pelanggaran. Sistem penegakan hukum yang efektif dapat menciptakan disinsentif terhadap praktik perikanan ilegal, tidak berkelanjutan dan merusak lingkungan yang pada gilirannya mendukung perkuatan tata kelola perikanan.

Dalam keseluruhan, kontribusi hukum perikanan terhadap perkuatan tata kelola perikanan bukan hanya menciptakan kerangka kerja hukum, tetapi juga memberikan dasar untuk implementasi, pemantauan, dan penyesuaian kebijakan. Dengan menjadikan keberlanjutan sebagai pijakan utama, hukum perikanan dapat memainkan peran sentral dalam mencapai keseimbangan ekosistem laut, yang esensial untuk keberlangsungan sumber daya perikanan dan kesejahteraan manusia (Sasvia, 2019).

2. Tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi hukum perikanan untuk mendukung konservasi sumber daya laut dan bagaimana upaya penyelesaiannya

Tantangan utama dalam implementasi hukum perikanan untuk mendukung konservasi sumber daya

laut melibatkan berbagai aspek yang mencakup kompleksitas ekosistem laut, ketidaksetaraan kekuatan antara pemangku kepentingan, ketidakpatuhan, dan kekurangan dalam kapasitas pengawasan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya serius dalam penyesuaian regulasi, peningkatan kapasitas institusi, dan penguatan kerja sama antarbangsa. (Lestari,2014).

Salah satu tantangan utama adalah ketidaksetaraan kekuatan di antara pemangku kepentingan dalam sektor perikanan. Nelayan kecil seringkali memiliki akses terbatas terhadap sumber daya dan terkadang diabaikan dalam pengambilan keputusan. Penyelesaiannya melibatkan pembentukan kebijakan yang inklusif, mengakomodasi kepentingan nelayan kecil, dan meningkatkan partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan.

Praktik perikanan IUU menjadi ancaman serius terhadap konservasi sumber daya laut. Ketidakpatuhan terhadap regulasi, penangkapan ikan di luar musim, dan penggunaan alat tangkap yang merusak menjadi tantangan dalam pengawasan. Penyelesaiannya memerlukan peningkatan pengawasan dan

penegakan hukum, penerapan teknologi pemantauan yang canggih, serta kerjasama internasional untuk mengatasi perbatasan maritim.

Kesadaran tentang pentingnya konservasi sumber daya laut seringkali kurang dikalangan nelayan dan masyarakat umum. Pendidikan dan advokasi menjadi kunci untuk meningkatkan pemahaman akan dampak perikanan yang tidak berkelanjutan.

Upaya penyelesaiannya melibatkan program-program edukasi yang melibatkan masyarakat lokal, membangun kesadaran tentang pentingnya menjaga ekosistem laut bagi keberlanjutan sumber daya.

Perubahan iklim memperkenalkan tantangan tambahan bagi konservasi sumber daya laut. Pemanasan global dan perubahan suhu laut dapat mengubah pola migrasi ikan, mempengaruhi reproduksi, dan meningkatkan risiko penyakit laut. Solusi melibatkan integrasi strategi adaptasi dalam hukum perikanan, termasuk penyesuaian batasan penangkapan berdasarkan perubahan dinamika ekosistem laut.

Banyak spesies ikan bermigrasi melintasi perbatasan nasional, dan kurangnya kerjasama internasional

dapat menghambat upaya konservasi. Pengelolaan perikanan yang efektif memerlukan kerjasama dan koordinasi lintas negara. Forum regional dan perjanjian internasional dapat meningkatkan harmonisasi regulasi dan penegakan hukum di seluruh wilayah kelautan.

Dalam rangka mengatasi tantangan-tantangan ini, perlu adanya pendekatan holistik yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Penguatan hukum perikanan harus disertai dengan upaya serius dalam meningkatkan kapasitas pengawasan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan membangun kerjasama internasional yang lebih efektif. Hanya dengan mengatasi tantangan ini secara komprehensif, kita dapat memastikan keberlanjutan ekosistem laut dan sumber daya perikanan untuk generasi mendatang (Rifai, 2014).

3. Peran pengku kepentingan, seperti nelayan, ilmuwan dan pemerintah, memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas hukum perikanan dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan mencapai tujuan keseimbangan ekosistem laut

Peran pemangku kepentingan, seperti nelayan, ilmuwan, dan

pemerintah, memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas hukum perikanan dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan mencapai tujuan keseimbangan ekosistem laut. Setiap pemangku kepentingan membawa perspektif, kepentingan, dan kapasitas yang berbeda, dan interaksi antara mereka dapat memperkuat atau menghambat upaya-upaya konservasi dan tata kelola perikanan (Tribawono, 2018).

Nelayan berperan sebagai pengguna langsung sumber daya laut. Jika terlibat dan mendukung implementasi hukum perikanan, mereka dapat menjadi mitra kunci dalam menjaga keberlanjutan sumber daya. Namun, jika nelayan menghadapi ketidakpastian ekonomi atau merasa bahwa aturan yang diterapkan tidak adil.

Ilmuwan berperan penting dalam menyediakan pengetahuan ilmiah yang mendasari peraturan perikanan. Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi adalah ketidaksepakatan di kalangan ilmuwan mengenai hasil penelitian, kekurangan data yang akurat, atau kompleksitas ekosistem laut yang sulit untuk dimodelkan dengan akurat.

Pemerintah memegang peran utama dalam pembentukan,

penegakan, dan pembaruan hukum perikanan. Kelemahan administrasi, korupsi, dan kurangnya konsistensi dalam penegakan hukum dapat menjadi hambatan serius.

Kerjasama antara nelayan, ilmuwan, dan pemerintah dapat meningkatkan efektivitas kebijakan. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan dapat menghambat pencapaian tujuan keseimbangan ekosistem laut.

Dalam rangka mencapai tujuan keseimbangan ekosistem laut, penting untuk membangun kerjasama antara nelayan, ilmuwan, dan pemerintah. Ini melibatkan pendekatan partisipatif dalam perumusan kebijakan, peningkatan kesadaran dan pendidikan, serta penguatan kapasitas semua pihak terlibat. Dengan mengatasi peran dan interaksi pemangku kepentingan, implementasi hukum perikanan dapat menjadi lebih efektif dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan mencapai tujuan keseimbangan ekosistem laut (Hasan, 2021).

D. Kesimpulan

Dalam mengkaji peran hukum perikanan dalam mendukung keseimbangan ekosistem laut dan keberlanjutan sumber daya perikanan,

perlu diperhatikan berbagai aspek kompleks yang melibatkan pemangku kepentingan utama seperti nelayan, ilmuwan, dan pemerintah. Sebagai sebuah sistem yang saling terkait, pemahaman bersama dan kerjasama antar-pihak terlibat menjadi kunci dalam mencapai tujuan konservasi yang optimal.

Oleh karena itu, untuk mencapai keseimbangan ekosistem laut yang diinginkan, perlu ada komitmen kuat untuk memperkuat kerjasama antar-pemangku kepentingan. Hal ini melibatkan pendekatan partisipatif dalam perumusan kebijakan, peningkatan kesadaran dan pendidikan masyarakat, serta peningkatan kapasitas semua pihak terlibat. Sebuah sistem pengelolaan perikanan yang sukses memerlukan kolaborasi yang erat dan kesepakatan bersama untuk menjawab tantangan-tantangan yang kompleks dan dinamis. Hanya melalui upaya bersama ini, keseimbangan ekosistem laut dan keberlanjutan sumber daya perikanan dapat diwujudkan untuk keberlanjutan masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Diputra, I. B. N. O., Disetujui, T. I. T.,
& Tesis, P. P. Penegakan
Hukum Perikanan DiIndonesia.

- Hasan, Y. A., & SH, M. (2021). *Hukum Laut Konservasi Sumber Ikan Di Indonesia*. Prenada Media.
- Istanto, Y. (2015). Penenggelaman Kapal Pelaku Illegal Fishing Sebagai Upaya Penegakan Hukum Perikanan Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 4/Pid. Sus-Prk/2014/Pn Tpg Pengadilan Negeri Tanjung pinang).
- Kurnia, I. (2022). *Aspek nasional dan internasional pemanfaatan surplus perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*. Sinar Grafika.
- Kurniawan, K. (2018). Strategi pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten Bangka Selatan. *Akuatik: Jurnal Sumberdaya Perairan*, 12(2).
- Lestari, M. M. (2014). Penegakan Hukum Pidana Perikanan Di Indonesia Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 271-295.
- Muhajir, M., Sumardjono, M. S., Manurung, T., & Ferdinand, J. (2019). Harmonisasi Regulasi dan Perbaikan Tata Kelola Sumber Daya Alam di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(2-2)
- Oktaviani, D., Prianto, E., & Puspasari, R. (2016). Penguatan kearifan lokal sebagai landasan pengelolaan perikanan perairan umum daratan di Sumatera. *Jurnal kebijakan perikanan Indonesia*, 8(1).
- Puspita, M. (2017). Kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut hukum adat laot dan lembaga panglima laot di Nanggroe Aceh Darussalam. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 3(2).
- Putra, Y. D. (2015). *Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing) Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*.
- Rifai, E., & Anwar, K. (2014). Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan. *Jurnal Media Hukum*, 21(2).
- Sasvia, H. (2019). Fisheries Law Enforcement in the Indonesian Sea Territory. *Lex Scientia Law Review*, 3(2).
- Siombo, D. M. R. (2013). *Hukum perikanan nasional dan*

internasional. Gramedia
Pustaka Utama.

Susilo, E., Indrayani, E., Puspitawati,
D., & Rahmawati, Y.
(2017). *Hukum Perikanan.*
Universitas Brawijaya Press.

Tribawono, I. H. D. (2018). *Hukum
Perikanan Indonesia.* PT Citra
Aditya Bakti.

Yenny, A. S. (2015). Implementasi
Desentralisasi Kewenangan
Dalam Pengelolaan Sumber
Daya Pesisir DiKalimantan
Barat. *Lex Publica*, 1(2).